

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Financial behavior merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari (Kholiah & Iramani, 2013). Munculnya *financial Behavior*, merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh (Kholiah & Iramani, 2013). *Financial managemet behavior* berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan.

2.2 Teori Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses dengan cara apa seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian dan penginterpretasikan atas informasi yang diterimanya dari lingkungan Herlan & Yono (2013) dalam Ermawati & Delima (2016). Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka Robbins (2008) dalam Ermawati & Delima (2016). Dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses seseorang dalam memilih, menerima, menginterpretasikan informasi untuk dapat diungkapkan ke lingkungan sekitar, dengan kata lain persepsi adalah tingkat pemahaman seseorang ketika melihat suatu informasi yang sesuai sudut pandang orang tersebut.

Persepsi seseorang terhadap teknologi akan dipersepsikan secara berbeda. Persepsi seseorang itu ada yang merasa teknologi baru sangat bermanfaat terhadap aktivitasnya sehari-hari, tetapi ada yang memiliki persepsi yang menyatakan bahwa dengan adanya teknologi membuat dirinya tidak nyaman dan tidak sesuai dengan kemampuan seseorang Ermawati & Delima (2016).

Teori persepsi dalam inklusi keuangan berkaitan dengan keyakinan seseorang dalam menggunakan produk keuangan, memilih produk keuangan yang diinginkan. Seseorang akan melalui sebuah proses pemilihan dalam menggunakan suatu produk layanan keuangan. Orang yang paham tentang teknologi yang berkaitan dengan keuangan dapat memilih produk keuangan yang mudah digunakan dan dipahami sehingga pengguna tidak merasa terbebani dengan adanya kemudahan akses pada layanan perbankan Ermawati & Delima (2016)

2.3 Inklusi Keuangan

Menurut Radyati dan Nindita (2012), Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki suatu akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang sangat terjangkau dan dengan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta menjunjung harga diri dan kehormatan. Menurut Bank Dunia, Keuangan Inklusif adalah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap produk layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefinisikan inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat tujuan inklusi keuangan yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan

2. Meningkatnya penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
3. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat

Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau instansi terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif. Berikut adalah pilar dan fondasi dari SNKI:

1. Pilar edukasi keuangan Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan juga jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban serta untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelola keuangan
2. Pilar hak properti masyarakat Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal
3. Pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan Bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat
4. Pilar layanan keuangan pada sector pemerintah Bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelanangan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai
5. Pilar perlindungan konsumen Bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan,

kerahasiaan dan keamanan data konsumen, penanganan, pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau

6. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu. Pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut :

1. Kebijakan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan suatu dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas
2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Fondasi ini sangat diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses suatu layanan keuangan
3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman suatu pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang jelas dan mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersamaan dan terpadu

2.3.1 Manfaat Inklusi Keuangan

Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral menjelaskan bahwa kondisi inklusif keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan
- c. Mengurangi *shadow*
- d. *Banking* atau *irresponsible finance*
- e. Mendukung pendalaman pasar keuangan
- f. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
- g. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia

- h. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonom lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan
- i. Mengurangi *inequality dan rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

2.3.2 Indikator Inklusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (2016) menyebutkan ada beberapa indikator yaitu:

1. Ketersediaan / akses
2. Penggunaan
3. Kualitas
4. Kesejahteraan

2.4 Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan atau Masyarakat, literasi keuangan adalah suatu pengetahuan, ketrampilan, keyakinan yang memengaruhi sikap dan juga perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Menurut Krishna, (2010) Literasi keuangan (*Financial Literacy*) dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya. Menurut Putri & henny (2017) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan bagian dari pembelajaran dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan investasi agar pembuatan keputusan sehari-hari lebih terarah dan bijaksana. Bhushan *and* Medury (2013) menyatakan bahwa penting untuk bisa memperoleh literasi keuangan dikarenakan saat ini banyak sekali produk keuangan yang mulai muncul dan seorang individu diharuskan untuk dapat mengerti risiko serta keuntungan dari produk keuangan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut,

maka penelitian mengartikan literasi keuangan merupakan pengetahuan seseorang mengenai bagaimana cara mengelola dan perencanaan keuangan mereka agar pembuatan keputusan keuangan sehari-hari lebih terarah.

2.4.1 Indikator Literasi Keuangan

Menurut Chen dan Volpe (1998), Terdapat 4 indikator literasi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum tentang keuangan,
2. Simpanan dan pinjaman,
3. Asuransi,
4. Investasi.

2.5 Financial Technology (Fintech)

Berdasarkan Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat (2016), *Financial Technology (Fintech)* merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor *finansial* dengan sentuhan teknologi moderen. Berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber (2017), *fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Berdasarkan Hsueh (2017), Teknologi Keuangan disebut sebagai *fintech* yang merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.

2.5.1 Jenis Fintech

Badan Internasional Pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, *Financial Stability Board (FSB)* membagi fintech dalam empat kategori berdasarkan jenisnya, diantaranya:

- a. *Payment, Clearing dan Settlement*. Ini adalah *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayara baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional BI (SKNB) hingga *BI Scripless Securities Settlement System (BI-*

SSSS). Contohnya seperti Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet, Xendit, Gopay, OVO dan lain-lain.

- b. E-Aggregator, *Fintech* ini menggunakan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Starup ini memberikan perbandingan suatu produk mulai dari harga, fitur hingga manfaatnya. Contohnya seperti Cekaja, Cermati, Kreditgogo dan Tunaiku.
- c. Manajemen resiko dan Investasi, *Fintech* ini memberikan layanan seperti robo advior (Perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan *platform e-trading* dan e-insure. Contohnya seperti Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi.
- d. *Peer to peer lending* (P2P), *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan cara pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang telah dipinjamkan. Contohnya seperti Modalku, Investree, Amarnya dan KoinWorks.

2.5.2 Peran Financial Teknologi (Fintech) di Indonesia

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) peran *fintech* di Indonesia sebagai berikut:

1. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk
2. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar
3. Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau
4. Meningkatkan Inklusi keuangan nasional
5. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah

2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Fintech

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari *fintech* ini adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *fintech* adalah :

- a. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b. Ada sebageaian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2.6 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Salah satu teori yang menjelaskan tentang model pendekatan penerimaan suatu teknologi yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi. Model TAM sendiri mendefinisikan dua hal yang mempengaruhi penerimaan penggunaan terhadap teknologi yaitu persepsi penggunaan terhadap manfaat dari teknologi dan kemudahan dalam menggunakan teknologi.

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan kerangka yang telah dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986. Model Davis di adaptasi dari teori sebelumnya yaitu *Theory Reasoned Action* yang berasumsi bahwa seseorang yang mengadopsi suatu teknologi pada umumnya ditentukan oleh proses kognitif dan bertujuan untuk memuaskan pemakainya atau memaksimalkan kegunaan teknologi tersebut. Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis yang menjelaskan bahwa perilaku

pengguna komputer yaitu berlandaskan pada kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), keinginan (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behaviour relationship*). Tujuan dari model ini untuk menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna terhadap penerimaan pengguna teknologi. Secara lebih terinci model ini sudah digunakan untuk memprediksi penerimaan teknologi informasi (TI) baru dan telah terbukti andal dalam menjelaskan perilaku penerimaan di beberapa bidang di Indonesia sistem informasi Wu *et al.* (2011).

2.6.1 Perceived Ease of Use

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor penting dalam TAM, yang nantinya berpengaruh terhadap faktor persepsi kemanfaatan dan sikap penggunaan. Bahkan persepsi kemudahan penggunaan adalah *antecedent* dari persepsi kemanfaatan. Dimana jika angka persepsi kemudahan penggunaan besar, maka persepsi kemanfaatan akan semakin tinggi Fu et al & Fetai dalam Jullie Jeanette Sondakh (2017).

Menurut Davis (1989) persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha “*is the extent to which a person believes that using a technology will be free of effort.*”

2.6.2 Perceived Usefulness

Pada umumnya ketika seseorang menggunakan teknologi baru untuk melaksanakan kegiatan, dia akan berpikir apakah teknologi tersebut dapat membantu dengan baik, meningkatkan produktifitas, menguatkan keefektifan dalam melakukan kegiatan tersebut, dan melaksanakan kegiatan tersebut lebih cepat dari pada sebelumnya. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terjawab dan ternyata memiliki jawaban

positif, maka akan muncul persepsi kegunaan bahwa teknologi baru tersebut membantu dan sebaliknya.

Perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang itu percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi sangat berguna, maka dia akan terus menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang itu merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna bahkan tidak berguna maka dia tidak akan menggunakannya. Menurut Jogiyanto (2008), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan suatu kepercayaan (*belief*) bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja individu sehingga mempengaruhi proses pengambilan suatu keputusan penggunaan teknologi tersebut.

2.7 Penelitian terdahulu

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Adinda Novita Sari & Achmad Kautsar (2020)	Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, <i>Financial Technology</i> , Dan Demografi Terhadap Inklusi Keuangan Pada	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini yaitu literasi keuangan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap inklusi keuangan masyarakat di

		Masyarakat Di Kota Surabaya		Kota Surabaya, yakni pencapaian keuangan inklusif sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan ketrampilan pengelolaan keuangan seseorang hingga dapat mengakses produk dan layanan keuangan secara bijak. Selain itu, faktor usia dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi inklusi keuangan masyarakat di Kota Surabaya.
--	--	-----------------------------------	--	--

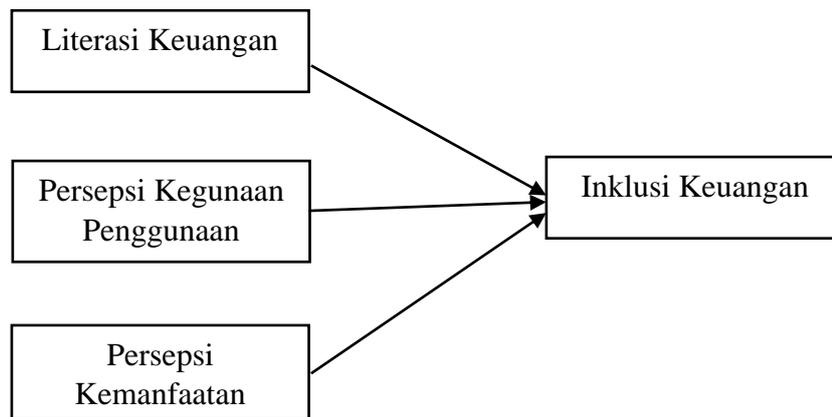
				Sedangkan untuk faktor <i>financial technology</i> , jenis kelamin, dan pendapatan diketahui tidak memberikan pengaruh terhadap inklusi keuangan masyarakat di Kota Surabaya.
2.	DelyanaRahmawany Pulungan & Ameliyani Ndruru, (2019)	Pengaruh Literasi Keuangan Dan Modal Sosial Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa	Penelitian asosiatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan, (2) modal sosial berpengaruh positif dan

				signifikan terhadap inklusi keuangan. Berdasarkan hasil uji F, keuangan inklusif dan modal sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keuangan inklusif
3.	I Nyoman Patra Kusuma, (2019)	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Melalui <i>Financial Technology</i> Pada Umkm Di Bandar Lampung	purposive sampling	Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa dengan literasi keuangan yang baik diharapkan UMKM akan mampu membuat keputusan manajemen dan keuangan

				yang tepat untuk peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha. Selain itu UMKM di Bandar Lampung dapat menggunakan produk financial technology yang berada di pengawasan OJK agar menghindari banyaknya kasus penipuan yang terjadi.
4.	Lia Muhibatul Aliyah & Nurdin, (2019)	Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (<i>Fintech</i>) terhadap Literasi	Pendekatan kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif Persepsi Kemanfaatan

		Keuangan Masyarakat Dago Atas, Bandung		dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Literasi Keuangan pada Masyarakat Dago Atas, Bandung.
5.	Siti Ruhana Dara & Mariah, (2020)	Peran <i>Fintech</i> Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat di Jakarta	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini adalah bahwa persepsi kemafaatan berpengaruh positif terhadap Literasi keuangan, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan

2.8 Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan

Literasi keuangan merupakan bagian dari pembelajaran dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan investasi agar pembuatan keputusan sehari-hari lebih terarah dan bijaksana Putri & henny (2017). Artinya, semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat inklusi keuangannya. Karena seseorang yang paham akan pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit dan pengelolaan tabungan dan investasi akan lebih mampu menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Dewi (2017) menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.

H1 : Diduga literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan mahasiswa IIB Darmajaya

2.9.2 Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan *fintech* Terhadap Inklusi Keuangan

Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*). Davis et al. (1989) mendefinisikan *percieved ease of use* sebagai keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana *user* percaya bahwa teknologi atau sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Hal ini akan mendorong masyarakat jadi lebih mudah dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan di manapun dan kapanpun untuk dapat tercapai tujuan inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Siti Ruhana Dara (2017) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan *fintech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.

H2 : Diduga persepsi kemudahaan penggunaan berpengaruh terhadap inklusi keuangan mahasiswa IIB Darmajaya

2.9.3 Pengaruh persepsi kemanfaatan *fintech* Terhadap Inklusi Keuangan

Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) Davis, et al., (1989) mendefinisikan *Perceived Usefulness* sebagai keyakinan akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana pengguna atau pemakai percaya bahwa penggunaan teknologi atau sistem akan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Ketersediaan *Fintech* diharapkan dapat diakses dan dapat digunakan oleh masyarakat yang selama ini belum bisa menjangkau atau belum mengerti layanan keuangan secara efektif sehingga merangsang pertumbuhan inklusi keungan Hutabarat (2018). Dalam penelitian

Durai & Stella (2019), Fanta & Makina (2019), dan Hutabarat (2018) menemukan hasil di mana *financial technology* memiliki pengaruh positif pada inklusi keuangan. Hal ini akan mendorong masyarakat jadi lebih mudah dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan di manapun dan kapanpun untuk dapat tercapai tujuan inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Cut Misni Mulasiwi (2020) menjelaskan bahwa persepsi kemanfaatan menggunakan *fintech* berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

H3 : Persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa IIB Darmajaya